

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan informasi dalam teknologi industri berkembang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Era dunia digital menjadi satu-satunya yang memiliki peran besar dalam kehidupan dan sebagian besar individu tidak dapat terlepas dari perangkat teknologi (Chang & Poon, 2016). Peningkatan pengguna internet juga terjadi di negara – negara berkembang. Berdasarkan data yang diperoleh *International Telecommunication Union* pada tahun 2011, terdapat peningkatan sebesar 18% dari tahun 2006 hingga tahun 2011. Indonesia juga merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki pengguna internet yang besar. Menurut data Kemenkominfo (2013) pengguna internet di Indonesia mencapai 95% dari total penduduk, menempati peringkat empat terbesar di dunia sebagai pengguna media sosial *facebook* dan berada pada peringkat lima terbesar di dunia sebagai pengguna media sosial *twitter*. Tahun 2017 pengguna internet di Indonesia sebanyak 130 juta orang dan meningkat menjadi 143 juta di tahun 2018, dengan persentase 10% masyarakat aktif membuat konten di media sosial sedangkan 90% menyebarkan (Komenkominfo, 2018).

Penggunaan internet yang tinggi menyiapkan individu hidup dalam dunia paralel, dimana kehidupan menjadi sebatas perangkat dan jaringan. Kecepatan akses informasi lintas ruang dan waktu memberikan kesempatan individu untuk terikat

pada dunia entertain, komersil, dan komunikasi tanpa batasan sebelumnya (Smallridge, Wagner, & Crowl, 2016). Menurut Firmansyah (2008) internet sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi berpeluang melakukan revolusi terhadap sistem, struktur dan proses demokrasi yang selama ini kita kenal. Selain itu media baru juga mendukung terjadinya perubahan gelombang demokrasi di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia.

Media selalu memainkan peran besar dalam mengorganisir gerakan keadilan sosial dan mendorong perubahan sosial. Munculnya internet bersama media tradisional lainnya telah membawa revolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya ke gerakan sosial (Castells, 2008). Peristiwa seperti *Arab Spring*, *Occupy Wall Street* dan *Syrian Uprising* semua dimulai sebagai gerakan dalam dunia digital yang dengan cepat berkembang menjadi upaya politik secara global (Khondker, 2011, Gaby & Caren, 2012). Terlebih, bahwa internet merupakan ruang publik yang dibuat agar orang-orang mampu melakukan pertukaran ide dan pendapat secara demokratis, hal ini menjembatani individu agar dapat melakukan pemenuhan diri dan pengembangan pribadi (Jones, 1997).

Pada tahun 2006, di Belarusia terdapat sebuah aksi kolektif dimana pemerintahan pada saat itu tidak memperbolehkan adanya aksi massa, hal itu ditakutkan akan menggulingkan pemerintahan. Sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan, pada bulan Mei seseorang memposting dengan nama *by\_mob* menggunakan perangkat lunak blog, *LiveJournal* untuk melakukan kegiatan *flash*

*mob* yang mengusulkan agar orang-orang hadir di *Oktyabrskaya Square* dan memakan es krim. Hasilnya adalah sudah terdapat polisi yang berjaga di taman tersebut dan akhirnya menangkap beberapa peserta *flash mob* ini, semuanya didokumentasikan oleh para peserta lainnya dan diunggah ke berbagai situs blog seperti *Flickr*, *LiveJournal* dan yang lainnya, sehingga pemerintahan pada saat itu mendapat tekanan dari publik global (Sullivan, 2009).

Bentivegna (dalam McQuail, 2012) telah merangkum manfaat potensial internet terhadap politik yang tersusun dalam enam atribut, yaitu 1) interaktif, tidak satu arah; 2) kehadiran bersama, komunikasi yang setara antara satu dengan yang lainnya; 3) disintermediasi, tereduksinya peran wartawan, masyarakat dapat langsung berkomunikasi dengan politisi mereka; 4) biaya yang murah; 5) kecepatan yang tidak mampu disaingi oleh media konvensional; 6) tidak adanya batasan.

Perkembangan internet yang cepat sebagai platform mobilisasi, gerakan aktivis menggunakannya untuk jalur komunikasi yang menghubungkan masalah publik secara global. Masalah tidak lagi terletak dalam batas-batas nasional dalam kemampuan mereka untuk melibatkan kelompok aktivis sebaliknya, kelompok aktivis memanfaatkan platform komunikasi online untuk menghubungkan masalah lokal dengan publik global (Dutta & Pal, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa media baru memberikan dampak yang signifikan terhadap bagaimana individu melakukan kegiatan aktivisme.

*Cyberactivism* merupakan cara baru dalam melakukan tujuan politik tertentu melalui media internet sebagai media baru pada era ini. Palfrey & Gasser (2008) menyebutkan bahwa munculnya *cyberactivism* merupakan sebuah hal natural kepada para pengguna media digital dalam berbagi pendapat serta keyakinan mereka dalam media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter*. Kehadiran media sosial memberikan dampak terhadap masyarakat yang kritis, hal ini dikarenakan bahwa media sosial memberikan ruang publik alternatif untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan (Abugaza, 2013).

Secara historis, tindakan kolektif pada umumnya melibatkan kegiatan yang ekstrim, seperti mogok kerja dan boikot, yang biasanya dianggap efektif untuk mencapai sebuah tujuan bersama (Vaccari, dkk, 2015). Aksi kolektif sendiri merupakan keterlibatan suatu kelompok masyarakat yang berbagi perhatian, selanjutnya akan memiliki tindakan atas dasar kebersamaan yang bermuara pada tujuan bersama (Fransesco, 2014).

Salah satu bentuk adanya *cyberactivism* dalam ranah politik, yaitu munculnya *cyberpolitic*. Di Indonesia, kondisi ini bermula pada pemilu 2009 kemudian pada aktivitas *cyber* dalam ranah politik semakin gencar dan aktif di tahun 2014, yang mana ditandai dengan upaya penggerakan massa dalam media sosial (Jati, 2016). Meningkatnya aktivitas *cyberpolitic* ditunjukkan oleh adanya peningkatan isu politik yang dikaji, seperti mulanya berada pada isu sebatas pelayanan publik,

redistribusi barang jasa, kebijakan publik dan bahasan meningkat pada level korupsi, suksesi kekuasaan dan pemilu (Jati, 2016).

Pergerakan mahasiswa merupakan salah satu bentuk dari *pressure group* yang berpartisipasi dalam politik sebagai bagian dari advokasi masyarakat dan bangsa. Pergerakan ini dilakukan guna mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan (Kusumah, 2007). Soule (2007), menggambarkan bahwa para kelompok mahasiswa di setiap kampus memiliki keterikatan satu sama lain secara langsung ataupun menggunakan internet untuk berkomunikasi, hal ini dilakukan guna memobilisasi dukungan, mengumpulkan sumber daya dan memberikan solidaritas. Peristiwa politik seperti *Arab Spring*, *Occupy Wall Street*, dan *Syrian Uprising* ketiganya merupakan sesuatu yang dimulai melalui media *online* dan berkembang menjadi upaya politik penuh (Gaby & Caren, 2012). Dari contoh-contoh peristiwa diatas, memberikan gambaran bagaimana para kelompok protes sosial ini mampu memobilisasi sumber daya untuk mengarahkannya kepada konteks pergerakan yang lebih besar dengan menawarkan pesertanya untuk melakukan tindakan melalui struktur komunikasi dalam pelaksanaannya (McAdam, 1983).

Secara historis, kelompok mahasiswa aktivis “*offline*” telah mendapat banyak tantangan yang sama, yaitu ketidakmampuan untuk menjangkau generasi mahasiswa selanjutnya (biasanya tidak lebih dari tiga tahun), hal ini menjadi penyebab kematian kampanye (Altbach, 1973). Untuk dapat bertahan dari permasalahan diatas, organisasi gerakan sosial harus mampu menghadapi fase

mobilisasi dan latensi (suatu hal yang sulit untuk dirubah). Mobilisasi mencakup perencanaan serta realisasi sebuah gerakan, sementara latensi ditandai dengan tidak adanya tindakan dari anggota organisasi dan kurangnya komitmen secara umum (Melluci, 1994).

Mahasiswa memiliki peran secara signifikan dalam simpangan sejarah berbagai bangsa di dunia. Pemuda dan mahasiswa menjadi garda terdepan guna menginisiasi serta melakukan pengawalan proses-proses perubahan besar sebuah bangsa (Kusumah, 2007). Pada tahun 1995, surat kabar *New York Times* mengisyaratkan era baru dalam bentuk proses yang dilakukan mahasiswa di Amerika Serikat yang mana diinisiasi oleh teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang akan memungkinkan mahasiswa di AS untuk mulai melakukan koordinasi, dan memelihara jaringan multi-kampus secara masif dalam gerakan protes skala nasional (Herszenhorn, 1995 dalam Biddix, 2015). Mahasiswa dapat mengekspresikan pendapat serta pemikiran kritis terkait suatu fenomena di forum web, hal ini mampu menjembatani hasil pembelajaran dikelas dengan berbagai masalah yang relevan dan terjadi di lingkungan mereka (Hennefer, 2013).

Salah satu cara guna melihat bagaimana kecenderungan seseorang untuk memunculkan perilaku *cyberactivism* adalah dengan mengukur intensi untuk melakukan *cyberactivism*. Caulfield (2007), menyatakan bahwa intensi mampu menjadi prediktor terbaik untuk perilaku, karena dapat merepresentasikan kesiapan

individu untuk memunculkan suatu perilaku dan dapat dianggap sebagai anteseden dari munculnya perilaku.

Terdapat model dalam kajian psikologi yang mampu memprediksi intensi melalui prediktornya, yaitu *theory of planned behavior*. Intensi mampu diprediksi melalui tiga prediktornya antara lain sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) terkait bagaimana individu berpikir terkait positif atau negatifnya suatu perilaku, norma subjektif (*subjective norms*) merujuk pada persepsi individu mengenai tekanan yang dihadirkan lingkungan, dan *perceived behavioral control* yang merupakan faktor penghambat dan pendukung individu untuk melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Terdapat banyak penelitian yang mendapatkan hasil bahwa intensi dapat memprediksi intensi pengisian petisi *online* dalam konteks politik Indonesia (Triwibowo, 2018), intensi untuk berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan oleh anggota komunitas *online* pecinta lingkungan di Cina (Park & Yang, 2012), dan intensi aktivisme konsumen di situs web internet terkait kasus *V4400* (Cho & Walton, 2009).

Gerakan mahasiswa terlahir melalui kondisi yang sedang dihadapi masyarakat yang dianggap sudah tidak sesuai dengan bagaimana cita-cita negara serta harapan masyarakat. Mahasiswa memberikan respon terkait situasi dan kondisi tersebut atas dasar pengabdian, aktor politik, kesadaran moral, dan tanggung jawab ilmu yang sudah dipelajari. Selain itu permasalahan global kerap menjadi pemicu dan inisiator dari sebuah aksi gerakan sosial atau politik. Dalam sebuah gerakan,

pergerakan mahasiswa banyak berafiliasi dengan unsur-unsur kekuatan lain hingga mencapai sebuah tujuan tertentu. Ideologi menjadi landasan berpikir dalam melakukan sebuah gerakan mahasiswa, mereka sering kali berpikir lateral dan anti kemapanan (Kusumah, 2007). Berdasarkan fakta yang telah di paparkan di atas dapat menjelaskan bagaimana proses aktivisme dan *cyberactivism* yang dilakukan oleh mahasiswa aktivis.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Internet membuat sebuah revolusi dalam kegiatan kolektif (Bennet & Segerberg, 2012). Singkatnya, fungsi khusus berbagi informasi dan interaksi sosial disediakan oleh internet yang mampu menciptakan ruang publik baru yang kondusif (Stockman & Luo, 2015). Dalam mengorganisir gerakan sosial, media selalu memiliki peran besar di dalamnya. Dalam perkembangannya internet mampu memberikan dampak yang besar dalam gerakan sosial di dunia (Castells, 2008).

Aksi damai 212 mampu diselenggarakan dengan melibatkan jutaan umat Muslim dari seluruh penjuru Indonesia, hal ini mampu terjadi karena adanya solidaritas yang hadir sejak adanya pidato Ahok di Kepulauan Seribu beredar luas di masyarakat Indonesia. Pidato itu dianggap menistakan agama Islam, permasalahan inilah yang menjadi pemantik dalam aksi ini. Fakta yang ditemukan bahwa umat Islam yang telah di dzalimi media massa pada akhirnya memilih sumber lain, seperti

*Facebook, Twitter* dan *Whatsapp*. Media ini dijadikan rujukan utama dan tercepat dalam mencari informasi (Hasib & Kholili, 2016).

Media sosial dinilai mampu menyebarkan informasi secara cepat dan masif kepada pemakainya. Dalam kasus ini *Facebook* menjadi media sosial yang dipilih oleh umat Muslim pada saat itu. Mereka membentuk '*jamaah facebookiyah*' yang digunakan sebagai bentuk pergerakan massa guna menggiring opini, wacana, dan memperdebatkan suatu hal (Hasib & Kholili, 2016). Pada saat ada wacana reuni akbar 212, para simpatisan ini akhirnya sudah yakin dengan prinsip mereka untuk hadir di dalamnya.

Sebagaimana dalam *Theory Planned Behavior* (TPB), terdapat dimensi *attitudes toward the behaviors* yang dapat diartikan sebagai keyakinan individu mengenai konsekuensi dari suatu perilaku (Ajzen, 2005). *Flash mob* yang terjadi pada bulan Mei 2006 di Belarusia, dalam aksi tersebut rencananya hanya akan berjalan bersama di sekitaran *Oktyabrskaya Park* dengan memakan es krim dan tersenyum satu sama lain. Para polisi yang ada di taman tersebut tidak bereaksi terhadap memakan es krim ataupun tersenyum sendiri. Perilaku yang dipilih sengaja bukanlah suatu hal membahayakan, karena pesan sebenarnya tidak terletak pada perilaku melainkan adalah tindakan kolektif itu sendiri. Para aktivis ini pada akhirnya dibubarkan dengan cara ditangkap, pada saat proses itu berlangsung beberapa dari mereka mengambil foto lalu menyebarkannya melalui media internet sehingga pemerintah mendapatkan tekanan (Shirky, 2008). Interaksi yang hadir antara

kekuatan keyakinan individu mengenai perencanaan dalam melakukan aksi dengan hasil yang didapatkan pada akhirnya menentukan suka atau tidak suka individu melakukan proses aktivisme tersebut.

*Subjective norm* merupakan dimensi yang sebagaimana terdapat dalam TPB dijelaskan sebagai persepsi individu terhadap harapan orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya mengenai dilakukan atau tidaknya sebuah perilaku (Ajzen, 2005). Kekuatan kelompok-kelompok gerakan dalam melakukan koordinasi semakin tersebar dan meningkat. Sudah banyak media yang bermunculan seperti media sosial, aplikasi *chatting*, web forum, dan banyak media lainnya yang mana alat ini mampu memberikan ruang alternatif yang disadari bersama guna memajukan kesadaran serta menambah koordinasi kelompok dalam mencapai tujuan politiknya. Seperti yang terjadi di Leipzig pada tahun 1989, pada saat itu *German Democratic Republic* (GDR) membatalkan seluruh bentuk perkumpulan termasuk Festival Musik Jalanan Leipzig yang diselenggarakan oleh warga negara secara independen dan menangkap semua musisi yang berpartisipasi. Setelah kejadian tersebut organisasi protes mulai tidak terlihat pergerakannya, akan tetapi hasilnya dapat dengan segera terlihat. Organisasi memberikan formula baru dalam melaksanakan gerakannya dengan menekan biaya dan berkoordinasi melalui forum *WeBlog*, dan pihak pemerintahan tidak memiliki cara untuk melacak siapa yang telah membuat dan melihat rencana tersebut. Kemajuan yang terjadi di Leipzig mampu meningkatkan penggunaan sosial dari media baru (Shirky, 2008). Data diatas menunjukkan bahwa pergeseran media

yang disepakati bersama guna mendapatkan proses dan hasil yang lebih baik dalam proses aktivisme terjadi peningkatan, terlebih individu dapat terpengaruh dengan hasil yang sudah di dapatkan dengan cara tersebut.

Dimensi yang terakhir dalam TPB adalah *perceived behavioral control* yang didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Hal ini terwujud dengan fakta bahwa dalam media sosial *Facebook* misalnya, tindakan menulis-membaca-menonton-mendengarkan diubah hanya menjadi bergabung dan berbagi. Hanya perlu menekan satu tombol “suka” untuk mendapatkan keanggotaan ke halaman *Facebook*. Untuk tombol “bagikan” individu tidak perlu membuat kontennya sendiri, akan tetapi kita bisa membagikan konten orang lain ke dalam akun kita. Terlebih metode percakapan yang awalnya individu ke individu, kini diperluas menjadi individu ke kelompok ataupun bisa kelompok satu ke kelompok lainnya yang mana hal ini terjadi secara bersamaan dalam satu waktu (Shirky, 2008). Hal ini tentu memberikan banyak manfaat dalam proses mobilisasi sebuah informasi dalam kegiatan aktivisme.

Difusi internet dan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) sebagai saluran yang diperluas untuk melakukan interaksi sosial dan pertukaran informasi menyebabkan komunitas mahasiswa dengan ciri-ciri yang sejenis memiliki kedekatannya dalam berbagi dalam bentuk komunikasi, psikologis, dan emosional. Para mahasiswa aktivis membutuhkan teknologi dan akses internet yang mampu mengarahkan pada tindakan langsung (Rheingold, 2003). Berkat berbagai aplikasi

dan fitur yang disediakan internet, orang-orang yang berada pada tingkat terbawah sekarang tidak hanya dapat menunjukkan kekuatan yang dinamis dan mengadopsi strategi yang lebih canggih untuk memberikan perubahan, tetapi juga untuk memberikan pesan mereka kepada audiens yang dianggap memiliki potensi terhadap suatu permasalahan (Best & Kellner, 2001).

Tentang apakah pelaku aktivisme secara *offline* memiliki kecenderungan melakukan *cyberactivism* dapat terjawab dari penelitian yang dilakukan Brunsting & Postmes (2002), yang mengatakan bahwa para aktivis yang berada diluar lingkaran aktivisme secara *online* dapat melakukan kegiatan *cyberactivism* dan hal ini menjadi bentuk peningkatan aktivisme berbasis *online* itu sendiri. Aktivis di seluruh dunia memanfaatkan aplikasi internet yang ekonomis dan efisien untuk menyebarkan klaim dan kritik tentang masalah sosial dan politik. Selain itu semakin banyak protes dan kegiatan yang melakukan pengorganisasian secara mandiri (Park & Yang, 2012).

Dari berbagai data yang dipaparkan dapat dihubungkan dengan bagaimana prediktor dari *theory of planned behavior* dapat memprediksi perilaku *cyberactivism* yang telah terjadi dalam contoh-contoh yang sudah diberikan. Penelitian mengenai perilaku *cyberactivism* dan TPB memang telah ada sebelumnya, akan tetapi masih sedikit yang mengaitkan dengan mahasiswa aktivis. Maka dari itu peneliti ingin mencari tahu apakah *theory of planned behavior* mampu digunakan untuk memprediksi intensi melakukan *cyberactivism* pada mahasiswa aktivis.

### **1.3. Batasan Masalah**

#### **1.3.1. Mahasiswa Aktifis**

Mahasiswa aktif merupakan seorang individu yang memiliki keterikatan dengan perguruan tinggi guna mengikuti proses pelajaran dengan rentang usia 18-30 tahun. (Sarwono, 1978). Yang mana mahasiswa ini pernah melakukan kegiatan aktivisme yang memiliki arti tindakan disengaja untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, yang menjadi sebuah proyek teoritis serta terfokus untuk memberikan perubahan politik atau sosial (Combs & Penfield, 2012).

#### **1.3.2. *Attitude Toward the Behavior* (Sikap terhadap Perilaku)**

Sikap terhadap perilaku dapat didefinisikan sebagai keyakinan individu mengenai konsekuensi dari suatu perilaku (Ajzen, 2005).

#### **1.3.3. *Subjective Norms* (Norma Subjektif)**

Norma subjektif merupakan persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (*significant others*) terhadap dilakukan atau tidak dilakukannya sebuah perilaku (Ajzen, 2005).

#### **1.3.4. *Perceived Behavioral Control* (Persepsi Pengendalian Diri)**

Persepsi pengendalian diri dapat diartikan sebagai fungsi yang didasarkan pada *control beliefs*, yaitu belief seseorang tentang ada atau tidak adanya faktor pendukung atau penghambat dalam memunculkan sebuah perilaku (Ajzen, 2005).

### **1.3.5. Intensi *Cyberactivism***

Intensi *cyberactivism* adalah keinginan seseorang untuk melakukan aksi politik atau gerakan sosial yang memiliki tujuan tertentu menggunakan media digital dan internet. Pada aktivitas *cyber* mampu menciptakan pola dinamika baru yang merupakan hasil dari sebuah tekanan (Illia, 2003).

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : apakah *attitude toward behavior* (sikap atas perilaku), *subjective norms* (norma subjektif) dan *perceived control behavior* (persepsi pengendalian diri) sebagaimana dalam *Theory of Planned Behavior* dapat memprediksi intensi *cyberactivism* pada mahasiswa aktivis?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran intensi perilaku *cyberactivism* pada mahasiswa aktivis dapat diprediksi melalui *attitude toward behavior* (sikap terhadap perilaku), *subjective norms* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (persepsi pengendalian diri) yang bersama-sama berdiri dalam model *theory of planned behavior*.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Teoritik**

Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan referensi terhadap penelitian selanjutnya yang akan menggunakan konstruk yang sama.

### **1.6.1. Manfaat Praktis**

1. Memberikan referensi kepada pemerintah dalam membuat kebijakan terkait fenomena *cyberactivism* yang ada di Indonesia utamanya dalam ranah politik.
2. Menyumbangkan informasi terkait perilaku *cyberactivism* di kalangan mahasiswa aktivis Indonesia kepada Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.